

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana wacana kekerasan dalam keluarga pada film *Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah*. Penelitian ini dilakukan mengingat tingginya angka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Menurut Gladies (2022), terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seringkali dilakukan oleh laki-laki sebagai suami kepada istri dan anak mereka. Laki-laki kerap dianggap sebagai pelaku kekerasan karena masyarakat masih mempertahankan budaya patriarki. Budaya tersebut menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan pemegang kuasa dalam keluarga. Akibatnya, banyak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada tekanan psikis dan kerugian fisik (N. E. Putri & Suherman, 2024).

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2017, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat tertinggi dengan total 5.784 kasus dan mayoritas korban berada pada rentang usia produktif yakni 25-40 tahun. Kondisi ini terus meningkat secara drastis di tahun 2023 sebanyak 34.682 kasus. Secara statistik, setidaknya terdapat 95 perempuan mengalami kekerasan setiap harinya, atau sekitar tiga hingga empat orang setiap jamnya. Puncaknya pada tahun 2025, angka kekerasan melonjak tinggi hingga 376.529 kasus dan meningkat sebesar 14,07% dari tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan yang dilaporkan antara lain kekerasan seksual yaitu sebesar 37,51%, kemudian kekerasan psikis 32,48%, dan kekerasan fisik 18,93%, sementara kekerasan ekonomi tercatat 11,07%.

Peningkatan angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di Indonesia berada pada kondisi memprihatinkan. Namun, angka tersebut merupakan gambaran dari fenomena gunung es (*the iceberg phenomenon*), yaitu penggambaran situasi dari bagian kecil suatu permasalahan yang terlihat dan menyembunyikan akar masalah yang jauh lebih besar di bawah permukaan (Richardo Napitupulu & Astro Julio, 2023). Data kekerasan yang dikalkulasi oleh Catahu Komnas Perempuan hanya sebagian kecil dari realitas yang ada, sementara kasus lainnya masih belum terungkap. Kondisi ini dipengaruhi oleh konstruksi sosial, seperti anggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam keluarga adalah aib yang perlu ditutupi dan ketergantungan ekonomi sehingga menghalangi korban menuntut keadilan.

Tingginya angka kekerasan dalam keluarga yang terjadi di Indonesia, pada dasarnya bertolak belakang dengan hakikat keluarga sebagai institusi sosial paling kecil di masyarakat. Membangun kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bahagia merupakan keinginan setiap keluarga. Sebagai unit paling kecil di masyarakat, keluarga adalah lingkungan pertama bagi individu untuk bertumbuh dan mengenal nilai-nilai sosial. Keluarga tidak hanya dibangun melalui ikatan biologis, melainkan melalui keintiman serta rasa aman dalam setiap interaksinya. Lingkungan keluarga yang positif dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri individu untuk berinteraksi dengan masyarakat (Widiyawati, 2018).

Menurut Friedman (dalam Kariman, 2020) definisi keluarga adalah dua atau lebih individu yang tinggal dalam satu rumah karena ikatan aturan tertentu dan memiliki perannya masing-masing. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

(Kemenkes) juga mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Berdasarkan definisi tersebut, keluarga sebagai wadah pendidikan pertama bagi individu idealnya harus menciptakan kondisi harmonis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penggambaran keluarga harmonis bukan berarti tanpa konflik, melainkan kemampuan untuk tetap bertumbuh dan menjalankan perannya di saat terjadi gesekan (Widiyawati, 2018).

Upaya untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut bergantung pada keberhasilan keluarga dalam menjalankan fungsinya. Ketika fungsi keluarga dijalankan secara optimal, maka setiap anggota keluarga dapat membangun pola komunikasi yang efektif dan saling memberikan dukungan (Herawati et al., 2020). Menurut Friedman (dalam Indriyani & Lindawati, 2024) terdapat beberapa fungsi keluarga, yaitu memberikan kasih sayang dan penanaman nilai moral, pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosialisasi, membimbing dan mengenalkan norma-norma sosial, serta memberikan pemenuhan ekonomi seperti sandang, pangan, papan, dan biaya pendidikan. Ketika fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan optimal, keluarga tidak hanya menjadi tempat untuk bertahan hidup secara fisik, melainkan ruang yang aman bagi pertumbuhan anak dan menciptakan keluarga sebagai sistem pendukung (*support system*) yang memungkinkan setiap individu memiliki kepercayaan diri dan kematangan emosional.

Harapan ideal dari kondisi tersebut adalah terciptanya keluarga sebagai sistem pendukung yang memungkinkan setiap individu memiliki kepercayaan diri dan kematangan emosional. Namun, dalam realitas sosial tidak semua keluarga

mampu menjalankan fungsi secara optimal. Tingginya angka kekerasan dalam ranah domestik menjadi bukti bahwa keluarga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, justru menjadi ruang tekanan bagi individu di dalamnya. Permasalahan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, penelantaran keluarga, maupun kekerasan simbolik yang seringkali tanpa disadari sebagai bentuk kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara umum diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun pasangan dalam satu rumah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai tindakan terhadap individu, khususnya perempuan, yang berdampak pada penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun pengabaian tanggung jawab rumah tangga. Merujuk pada definisi tersebut, terdapat beberapa macam bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga (Azahra & Suherman, 2024).

Kekerasan yang terjadi dalam ranah domestik tidak hanya memberikan dampak bagi relasi suami dan istri, secara tidak langsung dapat berpengaruh pada psikologis anak. Posisi anak dipandang memiliki tingkat kerentanan yang paling tinggi karena terbatas pada fisik, emosional, maupun sosial untuk melindungi diri dari tindakan kekerasan (Saputro et al., 2025). Kelompok rentan adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki resiko ancaman tinggi karena kurangnya kemampuan dalam menghadapi tekanan (Hutagalung, 2023). Sistem perlindungan terhadap kelompok rentan diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,

mengelompokkan lansia, ibu hamil, anak, fakir miskin, dan penyandang disabilitas yang termasuk ke dalam kategori ini. Dampak dari adanya kekerasan dalam keluarga kepada anak dan istri dapat menimbulkan trauma psikologis dengan jangka waktu yang panjang, serta menjadi beban yang berat (Nabih, 2024).

Dalam struktur sebuah keluarga, orang tua khususnya ayah, memegang otoritas penuh sebagai kepala keluarga (Billah, 2022). Hal ini berpengaruh pada penempatan ayah sebagai pihak dominan, sementara ibu berada pada posisi subordinat. Ketimpangan yang terjadi disebabkan oleh budaya patriarki yang diwariskan secara turun temurun sehingga membentuk perbedaan peran, status, serta kekuasaan antara suami dan istri (Halizah & Faralita, 2023).

Budaya patriarki merupakan sebuah sistem sosial budaya yang menganggap laki-laki lebih superior dalam berbagai aspek kehidupan. Stigma sosial yang terbentuk dari budaya ini memunculkan anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi atas kesalahan istri itu sendiri (Ariyanti & Ardhana, 2020). Anggapan tersebut membuka ruang bagi berlangsungnya kekerasan dalam relasi rumah tangga yang tidak dikenali sebagai kekerasan. Kekerasan tidak selalu dalam bentuk tindakan ekstrem yang dapat menimbulkan luka fisik, melainkan pola perilaku yang bekerja secara berulang dan dinormalisasi melalui adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban (Aisiyah et al., 2026). Akibatnya, istri tidak memiliki ruang dan perlindungan untuk menyuarakan penderitaannya, karena anggapan wajar bahwa sikap bersabar merupakan bentuk tunduk kepada suami (Syawitri & Afdal, 2020).

Fenomena kekerasan tersebut tergambarkan dalam sebuah film *Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah* yang menitikberatkan pada dinamika keluarga, relasi kuasa, serta kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Tanda-tanda kekerasan terlihat melalui penggunaan kata merendahkan yang diucapkan suami kepada istri dan anaknya, serta pengabaian tanggung jawab. Keadaan tersebut mencerminkan penggunaan kekuasaan laki-laki sebagai pembenaran atas tindakan sewenang-wenangnya, sehingga istri tidak memiliki pilihan lain selain bertahan (Siregar et al., 2025).

Film *Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah* menggambarkan keadaan rumah tangga yang jauh dari kata harmonis, terlihat dari kehadiran figur ayah yang cenderung membawa rasa takut daripada kenyamanan. Figur ayah digambarkan sebagai tokoh yang mendominasi setiap keputusan, sehingga terbatasnya ruang bagi anggota keluarga lainnya. Dominasi yang terjadi memberikan legitimasi munculnya indikasi kekerasan yang digunakan sebagai kontrol kepatuhan dalam rumah tangga (Musarrofa Ita, 2015).

Dalam narasi film tersebut, kekerasan ditampilkan sebagai ketimpangan relasi kuasa. Peran ayah juga tidak berjalan semestinya sehingga kebutuhan akan kasih sayang dan pemenuhan ekonomi tidak tercukupi. Melalui adegan dan dialog yang ditampilkan, film *Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah* dapat membongkar pola kekerasan yang sering kali dinormalisasi sebagai bentuk kedisiplinan.

Fenomena kekerasan diperkuat melalui peran media sebagai gambaran realitas sosial. Gambaran dalam film pada dasarnya bukanlah realitas yang netral, melainkan hasil konstruksi pembuat film yang dipengaruhi oleh ideologi, nilai

sosial, serta perspektif tertentu. Oleh karena itu, film dapat menjadi ruang diskursus yang memperlihatkan bagaimana kekerasan dalam keluarga dinarasikan, dinormalisasi, dikritisi, atau bahkan dilawan melalui cerita yang ditampilkan (Anwar, 2022). Analisis terhadap film menjadi penting untuk memahami bagaimana makna kekerasan keluarga diproduksi dan digambarkan melalui bahasa, narasi, serta simbol-simbol visual (Siregar et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memilih film *Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah* didasari oleh keberanian pembuat film dalam mengangkat realitas sosial sisi kelam rumah tangga melalui sudut pandang anak. Film ini memberikan gambaran nyata mengenai bentuk kekerasan yang terabaikan oleh perhatian publik, khususnya terkait penelantaran kewajiban serta dominasi otoritas figur ayah. Peneliti memandang adanya urgensi untuk melakukan penelaahan mendalam guna membongkar bagaimana pesan-pesan ketimpangan kekuasaan tersebut disampaikan melalui media film. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai wacana kekerasan dalam keluarga patriarki yang terkandung di dalam karya ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana wacana kekerasan dalam keluarga patriarki pada film *Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wacana kekerasan dalam keluarga patriarki pada film *Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam studi komunikasi media massa. Melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pustaka bagi peneliti selanjutnya dalam bidang komunikasi media massa, terutama yang berkaitan dengan analisis pesan-pesan sosial pada film mengenai ketimpangan peran di dalam ranah pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat agar lebih kritis dalam mengenali berbagai tanda kekerasan yang sering dianggap wajar, seperti pengabaian tanggung jawab dan tekanan batin dalam rumah tangga. Melalui penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat film untuk menghasilkan karya yang lebih peka terhadap isu sosial, sehingga film dapat berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan moral yang mendalam.